



Analisis Implementasi *Green Accounting* pada Rumah Sakit Universitas Padjadjaran

Mega Fildza Rahayu^{1*}, Faoziah Ulfah Fatmawati²

¹⁻²Program Studi Akuntansi Sektor Publik, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Padjadjaran, Indonesia

*Penulis Korespondensi: meqa22002@mail.unpad.ac.id

Abstract. *The increase in hospital waste volume as a result of healthcare operational activities raises demands for environmental management that is not only technically optimal, but also integrated into accounting and financial reporting aspects. This study aims to analyze the implementation of Green Accounting at Padjadjaran University Hospital, including the concept of Green Accounting through five stages of the process on environmental costs, as well as obstacles and challenges. The study used a qualitative approach with a case study method. Data were collected through interviews, observations, and documentation with informants from the Accounting and Finance unit, HSSE, third-party waste management, and the surrounding community. The results show that implementation of Green Accounting has not been formally carried out, environmental costs have only been identified in limited quantities, are recognized on an accrual basis but have not been specifically classified, are measured based on vendor invoices without ratio analysis, and have not been presented and disclosed as a separate item. The main obstacles include limited time, workload, manual recording, and the absence of specific regulations, while opportunities include cross-faculty collaboration and the integration of the HSSE system with accounting. The research results are expected to be used as evaluation material for Unpad Hospital in improving accountability, transparency, and sustainability of its environmental management.*

Keywords: *Environmental Cost; Environmental Management; Green Accounting; Hospital Waste; University Hospital.*

Abstrak. Peningkatan volume limbah rumah sakit sebagai dampak dari kegiatan operasional pelayanan kesehatan menimbulkan tuntutan terhadap pengelolaan lingkungan yang tidak hanya optimal secara teknis, tetapi juga terintegrasi dalam aspek akuntansi dan pelaporan keuangan. Penelitian bertujuan menganalisis implementasi *Green Accounting* pada Rumah Sakit Universitas Padjadjaran, mencakup konsep *Green Accounting* melalui lima tahapan proses pada biaya lingkungan, serta kendala dan tantangannya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi kepada informan dari unit Akuntansi dan Keuangan, HSSE, pihak ketiga pengelola limbah, serta masyarakat sekitar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi *Green Accounting* belum dilakukan secara formal, biaya lingkungan baru teridentifikasi terbatas, diakui berbasis akrual namun belum terklasifikasi khusus, diukur berdasarkan *invoice* vendor tanpa analisis rasio, serta belum disajikan dan diungkapkan sebagai pos tersendiri. Kendala utama meliputi keterbatasan waktu, beban kerja, pencatatan manual, serta belum adanya regulasi khusus, sementara peluangnya meliputi kolaborasi lintas fakultas dan integrasi sistem HSSE dengan akuntansi. Hasil penelitian diharapkan menjadi bahan evaluasi bagi RS Unpad dalam meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan keberlanjutan pengelolaan lingkungannya.

Kata Kunci: Akuntansi Hijau; Biaya Lingkungan; Limbah Rumah Sakit; Manajemen Lingkungan; Rumah Sakit Universitas.

1. LATAR BELAKANG

Besarnya volume limbah yang dihasilkan rumah sakit yang mewajibkan untuk melakukan pengelolaan limbah yang mencakup serangkaian tahapan sistematis mulai dari pemilahan, pewadahan, pengumpulan, pengangkutan, penampungan, hingga pengolahan akhir limbah medis maupun non medis (Kementerian Kesehatan, 2023). Setiap tahapan tersebut menuntut sumber daya yang besar, mulai dari penyediaan fasilitas Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), tenaga kerja terlatih, pengadaan alat pelindung diri, operasional Tempat Penyimpanan Sampah Sementara (TPS), pemeliharaan lingkungan secara berkala, hingga kerja

sama dengan pihak ketiga (Irawati et al., 2024). Biaya pengelolaan limbah merupakan konsekuensi langsung dan tidak terhindarkan dari kewajiban tersebut. Hal ini sejalan dengan prinsip *polluter pays* (pencemar membayar), yang menekankan bahwa setiap institusi atau pencemar harus menanggung biaya pengelolaan dan pemulihan lingkungan dari aktivitasnya. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa jika biaya pengelolaan terlalu tinggi, beberapa organisasi mungkin memilih untuk membuang limbah medis secara ilegal, sehingga mencemari lingkungan. Sementara itu, jika biaya pengelolaan terlalu rendah, hal ini menyebabkan kekurangan dana untuk menjaga kualitas pengelolaan limbah (LiYing, 2026). Ketika biaya pengelolaan limbah tidak diidentifikasi, diukur, dan disajikan secara transparan dalam sistem akuntansi rumah sakit, berbagai konsekuensi akan muncul, seperti kurangnya transparansi yang dapat menyebabkan pengeluaran yang tidak terkontrol dan hilangnya informasi penting bagi manajemen sebagai dasar pengambilan keputusan untuk efisiensi dan peningkatan kinerja lingkungan secara berkelanjutan. Lebih lanjut, anggaran pengelolaan limbah di rumah sakit belum berjalan secara efektif, dan terjadi penyimpangan berupa realisasi biaya yang melebihi anggaran yang ditetapkan karena peningkatan jumlah limbah medis dan domestik seiring dengan peningkatan jumlah pasien dan pengunjung (Febriyanti et al., 2024).

Kondisi ini banyak terjadi karena akuntansi konvensional yang cenderung mengelompokkan seluruh pengeluaran terkait dampak lingkungan ke dalam pos biaya operasional tanpa kategori khusus (Lako, 2019). Oleh karena itu, berkembanglah akuntansi lingkungan sebagai bentuk tanggung jawab sosial di bidang akuntansi yang berupaya untuk mengidentifikasi, mengukur, menyajikan, dan mengungkapkan biaya lingkungan. Dalam pengelolaan limbah, rumah sakit harus menerapkan akuntansi lingkungan untuk mendukung kegiatan operasional mereka, serta bertindak sebagai kontrol atas tanggung jawab rumah sakit (Setiawan et al., 2020). Dalam konsep *green accounting*, besarnya biaya lingkungan dapat dicatat, diakui, diungkapkan dan disajikan secara tepat dalam laporan keuangan (Wirawan & Angela, 2024; Kereh et al., 2025). Menurut Hansen et al. (2026), biaya lingkungan dapat diklasifikasikan ke dalam empat kategori, yaitu biaya pencegahan (*prevention cost*), biaya deteksi (*detection cost*), biaya kegagalan internal (*internal failure cost*), serta biaya kegagalan eksternal (*external failure cost*). Dalam analisa biaya lingkungan tersebut melibatkan lima tahapan sistematis yang merujuk pada PSAK 201, sebagai konsep dasar dalam perlakuan akuntansi untuk menentukan bagaimana suatu transaksi dicatat dan dilaporkan dalam laporan keuangan, mencakup identifikasi seluruh aktivitas yang berpotensi menimbulkan biaya lingkungan, pengakuan biaya lingkungan sesuai standar akuntansi, pengukuran berdasarkan data aktual, penyajian biaya lingkungan dalam laporan keuangan, serta pengungkapan laporan

kepada pemangku kepentingan (Astuti et al., 2025). Pemisahan dan klasifikasi biaya lingkungan memungkinkan manajemen mengidentifikasi inefisiensi, mengoptimalkan alokasi anggaran, dan mengevaluasi efektivitas program lingkungan (Neelima et al., 2024). Tak hanya itu, pihak rumah sakit juga dapat menerapkan akuntansi lingkungan dengan biaya lingkungan yang bertujuan untuk memastikan biaya yang timbul dari pengelolaan limbah dapat dicatat dan dipublikasikan dengan baik dalam laporan keuangan rumah sakit (Gasperz & Kriswantini, 2021). Meskipun, belum tersedianya standar akuntansi khusus yang mengatur akuntansi lingkungan di Indonesia (Zai et al., 2025). Namun, berbagai regulasi yang mendorong untuk mengatur pengelolaan limbah dan memastikan kepatuhan terhadap prinsip akuntansi lingkungan. Pengelolaan limbah rumah sakit harus dilakukan secara tepat dan sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk meminimalkan risiko terhadap kesehatan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan, sehingga lingkungan rumah sakit diterima oleh masyarakat (Kementerian Kesehatan, 2023; Sumiar et al., 2025). Dalam hal tersebut, PSAK 201 mendorong entitas untuk menyajikan laporan tambahan mengenai lingkungan hidup apabila relevan bagi pengguna laporan keuangan. Meskipun bersifat sukarela, pelaporan biaya lingkungan yang transparan terbukti meningkatkan kredibilitas dan legitimasi rumah sakit di mata pemangku kepentingan (Wicaksono et al., 2024).

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penelitian ini merupakan modifikasi dari berbagai penelitian terdahulu yang berkaitan dengan biaya lingkungan. Penelitian ini didasari dengan konsep keberlanjutan (*sustainability*), khususnya berkaitan pada akuntansi lingkungan yang cenderung lebih sering diterapkan pada perusahaan dibandingkan dengan sektor kesehatan, padahal kegiatan operasional rumah sakit juga berpotensi menimbulkan dampak lingkungan yang signifikan, terutama dalam pengelolaan limbah medis dan non medis. Maka dari itu, kajian mendalam di RS Unpad terhadap penerapan *Green Accounting* dalam proses pengelolaan limbah, sistem pencatatan dan pelaporan keuangannya, serta analisis bagaimana biaya lingkungan yang timbul dari kegiatan operasional rumah sakit menjadi penting untuk dikaji lebih lanjut melalui proses identifikasi, klasifikasi, dan pengukuran yang sistematis.

2. KAJIAN TEORITIS

Teori Legitimasi

Teori legitimasi merupakan sistem perusahaan yang dikelola untuk berorientasi pada keterlibatan terhadap masyarakat, organisasi masyarakat, dan pemerintah (Carroll et al., 2018). Berdasarkan teori legitimasi menyatakan bahwa adanya kontrak sosial antara organisasi dan masyarakat, di mana organisasi secara langsung ataupun tidak langsung bertanggung jawab

untuk melaksanakan kegiatan operasionalnya dengan norma dan ekspektasi masyarakat (Deegan, 2023). Apabila organisasi dianggap tidak mampu dalam memenuhi kontrak sosial tersebut, maka keberlangsungan operasionalnya dapat terancam yang diakibatkan dari tekanan masyarakat, seperti pembatasan akses terhadap sumber daya, hingga berkurangnya legitimasi operasional (Wahyuningrum et al., 2023).

Bagi rumah sakit, legitimasi memiliki peran yang sangat penting karena rumah sakit bergantung pada kepercayaan publik serta dukungan pendanaan dari berbagai pihak. Maka dari itu, rumah sakit perlu menunjukkan bahwa kegiatan operasionalnya tidak hanya berfokus pada pelayanan kesehatan, melainkan juga memperhatikan dampak lingkungan yang ditimbulkan, seperti penggunaan energi yang tinggi dan produksi limbah medis. Kondisi ini mendorong masyarakat yang terkena dampak menuntut transparansi pengelolaan lingkungan. Tuntutan tersebut mendorong rumah sakit untuk menerapkan *Green Accounting* dalam menyajikan informasi mengenai pengelolaan lingkungan, pengukuran biaya lingkungan, serta sebagai strategi untuk meningkatkan legitimasi masyarakat dan memperkuat kepercayaan publik terhadap rumah sakit (Sumiar et al., 2025).

Teori Pemangku Kepentingan

Teori *stakeholder* merupakan kerangka konseptual dalam etika bisnis dan manajemen organisasi (Schaltegger et al., 2019). Teori *stakeholder* memandang bahwa keberadaan perusahaan tidak semata-mata bertujuan untuk memaksimalkan keuntungan guna memenuhi kepentingan pemegang saham, tetapi juga harus memperhatikan kepentingan para pemangku kepentingan lainnya, seperti karyawan, konsumen, pemasok, masyarakat, pemerintah, dan pihak terkait lainnya. Oleh karena itu, dalam kegiatan bisnis diperlukan adanya interaksi antara manajer dan para pemangku kepentingan untuk menciptakan nilai bersama (Freeman et al., 2020).

Berdasarkan teori *stakeholder*, manajemen rumah sakit tidak hanya berorientasi pada kepentingan pemegang saham dalam upaya memaksimalkan keuntungan, tetapi juga harus memperhatikan kepentingan *stakeholder* lainnya. Perhatian tersebut terwujud dalam kewajiban rumah sakit untuk mengelola dan melaporkan dampak lingkungan dan aktivitasnya, khususnya pengelolaan limbah medis secara bertanggung jawab. Pihak yang berkepentingan di rumah sakit, meliputi para pasien, tenaga kesehatan, masyarakat sekitar rumah sakit, karyawan, pemerintah, serta lingkungan hidup. Oleh karena itu, *Green Accounting* menyediakan kerangka pelaporan yang memungkinkan rumah sakit untuk mengkomunikasikan tanggung jawab lingkungannya secara transparan dan akuntabel kepada seluruh pemangku kepentingan.

Dukungan ini sangat diperlukan untuk keberlanjutan rumah sakit dalam jangka panjang (Dachi & Djakman, 2020; Hasiana et al., 2021).

Green Accounting

Akuntansi lingkungan merupakan suatu akuntansi yang mencakup kegiatan dari pengidentifikasian, pengukuran, penilaian, dan pengungkapan terkait biaya-biaya lingkungan yang dihasilkan dari aktivitas perusahaan (Lako, 2019). Menurut Bell & Lehman (1999) menjelaskan *Green Accounting* merupakan suatu metode yang dapat diterapkan guna mengkomunikasikan dampak yang ditimbulkan oleh kegiatan operasional perusahaan terhadap kondisi lingkungan dalam laporan keuangan perusahaan (Ratnasari & Hasibuan, 2025). Penerapan *Green Accounting* di rumah sakit bertujuan untuk mengoptimal anggaran biaya, ketaatan pada regulasi, serta bertanggung jawab terhadap aspek sosial dan lingkungan (Flora et al., 2025). Mengingat tingginya risiko yang dihadapi rumah sakit dalam penanganan limbah medis yang berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan, serta adanya tuntutan untuk melakukan inovasi guna meningkatkan mutu pelayanan (Wirawan & Angela, 2024). Konsep ini memungkinkan rumah sakit untuk mengidentifikasi berbagai dampak lingkungan yang timbul, kemudian mengelola serta mengukur dampak tersebut secara sistematis. Selain itu, rumah sakit juga dapat melakukan pelaporan terkait dampak lingkungan yang dihasilkan sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas. Tak hanya itu, penerapan *Green Accounting* dapat mendorong peningkatan kesadaran serta komitmen organisasi dalam mewujudkan keberlanjutan lingkungan (Batara et al., 2024).

Biaya Lingkungan

Biaya lingkungan merupakan beban yang harus ditanggung perusahaan akibat penurunan kualitas lingkungan, serta berbagai upaya pencegahan terhadap potensi kerusakan lingkungan yang mungkin terjadi di masa mendatang (Ningsih et al., 2025). Adapun klasifikasi biaya lingkungan yang diuraikan sebagai berikut (Hansen et al., 2026): Biaya pencegahan lingkungan (*environmental prevention cost*), merupakan biaya yang dikeluarkan untuk mencegah produksi atau limbah yang dapat mencemari lingkungan. Biaya deteksi lingkungan (*environmental detection cost*), merupakan biaya yang dikeluarkan untuk mengidentifikasi produk atau limbah yang berpotensi menimbulkan dampak terhadap lingkungan. Biaya kegagalan internal lingkungan (*environmental internal failure cost*), merupakan komponen biaya yang timbul akibat adanya produk atau limbah yang telah dihasilkan namun belum dibuang atau dilepaskan ke dalam lingkungan. Biaya kegagalan eksternal lingkungan (*environmental external failure cost*), merupakan biaya pengeluaran saat limbah telah dibuang

atau dihancurkan ke lingkungan. Penerapan akuntansi atas biaya lingkungan merujuk pada konsep yang dikemukakan oleh Hansen et al. (2026), serta sebagaimana untuk mengetahui alokasi biaya lingkungan melalui tahapan analisa terhadap suatu transaksi atau peristiwa ekonomi yang ditentukan pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 201 tentang Penyajian Laporan Keuangan. Tahapan analisa biaya lingkungan sebagai berikut: Identifikasi, Proses awal, di mana entitas berfokus pada penetapan biaya untuk mengidentifikasi dampak negatif yang mungkin ditimbulkan dari kegiatan pengelolaan limbah. Peristiwa tersebut dicatat secara sistematis dalam satuan moneter sebagai bagian dari aktivitas keuangan. Selanjutnya, informasi tersebut disajikan dalam laporan akuntansi dengan pengklasifikasian biaya lingkungan secara khusus pada Hansen et al. (2026) yang mencakup empat kategori, yaitu biaya pencegahan, biaya deteksi, biaya kegagalan internal, serta biaya kegagalan eksternal. Pengakuan, Berdasarkan Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan paragraf 5.1, pengakuan didefinisikan sebagai suatu proses untuk menetapkan apakah suatu pos telah memenuhi unsur dan kriteria tertentu sehingga layak dicantumkan dalam laporan keuangan. Suatu pos baru dapat diakui apabila memenuhi dua syarat utama, yaitu: nilai atau biayanya dapat diukur secara andal, serta terdapat kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang berkaitan dengan pos tersebut akan mengalir ke dalam entitas.

Dalam konteks biaya lingkungan pada rumah sakit, pengakuan dilakukan pada saat entitas telah menerima manfaat ekonomi dari pelaksanaan aktivitas pengelolaan lingkungan, misalnya pemanfaatan jasa pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3). Pengukuran, Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan paragraf 6.1 menyatakan bahwa pengukuran akuntansi terdiri atas dua kategori, yaitu biaya historis dan nilai kini, dengan nilai kini mencakup nilai wajar, nilai pakai, nilai pemenuhan, dan biaya kini. Pengukuran merupakan proses penetapan nilai moneter untuk mengakui dan mencatat suatu pos dalam laporan keuangan berdasarkan estimasi andal atas pengeluaran yang diperlukan guna memenuhi suatu kewajiban. Dalam konteks rumah sakit, pengukuran ini diterapkan pada biaya pengelolaan limbah, operasional IPAL, pemeliharaan fasilitas lingkungan, serta jasa pihak ketiga dalam pengolahan limbah. Penyajian, Menurut Hansen et al. (2026), penyajian biaya lingkungan memiliki peran penting dalam mendukung pengendalian dan perbaikan biaya lingkungan, sehingga idealnya biaya lingkungan disajikan secara terpisah dan terklasifikasi sesuai kategorinya agar dapat memberikan informasi yang lebih transparan dan akuntabel kepada pemangku kepentingan. Sejalan dengan hal tersebut, PSAK 201 tentang Penyajian Laporan Keuangan memberikan fleksibilitas bagi entitas untuk menyajikan laporan tambahan terkait lingkungan hidup apabila dinilai relevan, baik dalam bentuk pos tersendiri pada laporan

laba rugi, bagian dari Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), maupun laporan keberlanjutan terpisah. Penyajian yang terklasifikasi ini memungkinkan diperolehnya informasi yang lebih jelas mengenai dampak biaya lingkungan terhadap keberlanjutan lingkungan (Fadilah et al., 2025). Pengungkapan, Pengungkapan dalam biaya lingkungan adalah penyajian informasi mengenai proses dan hasil dari kegiatan pengelolaan limbah, serta biaya lingkungan dalam laporan keuangan atau catatan atas laporan keuangan. Pengungkapan ini umumnya bersifat sukarela dan berfungsi sebagai sarana untuk menggambarkan kinerja serta komitmen rumah sakit dalam mengelola dampak lingkungan secara transparan (Sahrir et al., 2024).

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Metode studi kasus digunakan untuk memahami secara mendalam implementasi *Green Accounting* pada Rumah Sakit Universitas Padjadjaran, khususnya terkait permasalahan yang diteliti bersifat kontekstual dan kompleks, sehingga tidak hanya cukup hanya digambarkan, melainkan perlu dianalisis mengenai bagaimana rumah sakit mengidentifikasi, mencatat, mengklasifikasikan, menyajikan, dan mengungkapkan biaya lingkungan yang timbul dari aktivitas pengelolaan limbah. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu wawancara dengan unit Akuntansi dan Keuangan, unit *Health, Safety, Security, and Environment* (HSSE), pihak ketiga pengelola limbah dan masyarakat sekitar. Kemudian, dokumentasi pada struktur organisasi, laporan keuangan, serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pengelolaan limbah. Tak hanya itu, kegiatan observasi secara langsung pada lapangan terhadap proses pengelolaan limbah dan penerapan *Green Accounting* pada Rumah Sakit Universitas Padjadjaran.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Implementasi *Green Accounting* pada Rumah Sakit Universitas Padjadjaran

Pengelolaan limbah rumah sakit merupakan salah satu wujud tanggung jawab lingkungan yang secara langsung berkaitan dengan konsep green accounting, mengingat setiap tahapan dalam aktivitas pengelolaan limbah menimbulkan konsekuensi biaya yang harus diidentifikasi, diakui, diukur, disajikan, serta diungkapkan secara memadai dalam sistem akuntansi rumah sakit. Konsep *Green Accounting* dalam penelitian ini dianalisis melalui lima tahapan sistematis, yaitu identifikasi, pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan biaya lingkungan, dengan mengacu pada klasifikasi biaya lingkungan yang dikemukakan oleh Hansen et al. (2026), serta ketentuan PSAK 201 mengenai pelaporan hal-hal yang berkaitan

dengan lingkungan hidup. Biaya lingkungan dalam penelitian ini dibatasi pada biaya-biaya yang timbul dari aktivitas pengelolaan limbah rumah sakit.

Identifikasi Biaya Lingkungan

Tahap identifikasi merupakan titik awal yang menentukan sejauh mana suatu entitas mampu mengenali seluruh konsekuensi biaya yang timbul dari aktivitas yang berdampak terhadap lingkungan. Berdasarkan hasil wawancara menunjukkan bahwa RS Unpad hingga saat ini baru mengidentifikasi biaya lingkungan secara terbatas pada dua pos utama, yaitu biaya pengangkutan limbah medis oleh pihak ketiga, dan biaya yang berkaitan dengan operasional IPAL. Sebagaimana informasi tersebut sesuai yang dijelaskan oleh Ibu SS selaku Manajer unit Akuntansi dan Keuangan RS Unpad: “Biaya yang teridentifikasi hingga saat ini baru mencakup biaya pengangkutan limbah medis. Selain itu, terdapat pula biaya terkait IPAL, meskipun sifatnya tidak rutin setiap bulan.” (Wawancara, 7 Juli 2025). Dalam tujuan untuk memperdalam temuan tersebut, peneliti melakukan penelusuran data sekunder guna memetakan lebih rinci jenis-jenis biaya yang timbul dari aktivitas pengelolaan limbah. Apabila biaya-biaya tersebut dipetakan ke dalam klasifikasi biaya lingkungan menurut Hansen et al. (2026), diperoleh gambaran sebagaimana disajikan pada Tabel 1 sebagai berikut:

Tabel 1 Klasifikasi Biaya Pengelolaan Limbah RS Unpad Tahun 2025.

Klasifikasi Biaya Lingkungan (Hansen et al., 2026)	Biaya Pengelolaan Limbah	Proporsi
Biaya Pencegahan (<i>Prevention Costs</i>)		
Kebutuhan pengendalian IPAL	20.500.000	
Subtotal Biaya Pencegahan	20.500.000	10%
Biaya Deteksi (<i>Detection Costs</i>)		
Biaya uji air dan lingkungan	59.893.250	
Subtotal Biaya Deteksi	59.893.250	29%
Biaya Kegagalan Internal (<i>Internal Failure Costs</i>)		
Biaya pengangkutan limbah medis oleh pihak ketiga	94.499.824	
Biaya operasional, pemeliharaan, dan perbaikan IPAL	31.632.225	
Subtotal Biaya Kegagalan Internal	126.132.049	61%
TOTAL	206.525.299	100%

Sumber: Daftar Kontra Bon Non Farmasi RS Unpad, Data diolah Peneliti (2026).

Klasifikasi pada Tabel 1 memperlihatkan bahwa biaya lingkungan yang dikeluarkan RS Unpad pada dasarnya telah mencakup tiga dari empat kategori biaya lingkungan menurut Hansen et al. (2026), yaitu biaya pencegahan, biaya deteksi, dan biaya kegagalan internal, sementara biaya kegagalan eksternal tidak teridentifikasi. Adapun biaya kegagalan internal menjadi kategori dengan kontribusi paling dominan, yaitu sebesar Rp126.132.049 atau 61% dari total biaya lingkungan, yang terdiri atas biaya pengangkutan limbah medis oleh pihak ketiga sebesar Rp94.499.824 dan biaya operasional, pemeliharaan, serta perbaikan IPAL sebesar Rp31.632.225. Tingginya proporsi biaya ini tidak terlepas dari karakteristik limbah

medis yang bersifat infeksius dan berbahaya, sehingga tidak dapat diolah atau dibuang secara sembarangan oleh pihak internal rumah sakit dan mewajibkan penyerahannya kepada pihak ketiga berizin secara rutin. Ketergantungan inilah yang menjadikan biaya pengangkutan limbah medis oleh pihak ketiga sebagai beban berulang setiap periode

Pengakuan Biaya Lingkungan

Proses pengakuan biaya lingkungan di RS Unpad mengikuti basis akrual sebagaimana diatur dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Beban diakui setelah *invoice* diterima, dan apabila proses belum selesai namun masih berada dalam periode akuntansi yang sama, biaya tersebut tetap diakui secara akrual sebelum pembayaran dilakukan. Hal tersebut sejalan dengan penjelasan Ibu DFF sebagai Staf unit Akuntansi dan Keuangan RS Unpad berikut. “Proses pencatatan dimulai dari adanya tagihan (*invoice*) dari vendor pengangkutan limbah. Biaya pengangkutan limbah diakui terlebih dahulu pada bulan berjalan meskipun pembayarannya baru dilakukan pada bulan berikutnya.” (Wawancara, 22 Juni 2026). Berdasarkan penjelasan tersebut, praktik pengakuan biaya lingkungan di RS Unpad dapat diilustrasikan melalui dua jurnal akuntansi berikut.

Tabel 2. Ilustrasi Jurnal Pengakuan Biaya Pengangkutan Limbah Medis.

Beban Pengangkutan Limbah Medis	Rp. 3.000.000
Utang Pengadaan Barang dan Jasa	Rp. 3.000.000

Sumber: Data diolah Peneliti, 2026 (jurnal pada saat pengakuan beban).

Pada bulan berikutnya, saat pembayaran dilakukan, akun utang tersebut dibalik melalui jurnal debit Utang Pengadaan Barang dan Jasa dan kredit Kas sebesar nilai yang sama.

Perlakuan yang berbeda ditemukan pada biaya pemeliharaan IPAL, yang diakui langsung sebagai bagian dari akun Beban Pemeliharaan Sarana dan Prasarana secara umum, tanpa dipisahkan ke dalam akun tersendiri. Kondisi ini ditegaskan oleh pernyataan berikut. "Biaya pemeliharaan IPAL belum memiliki kode akun khusus, biaya tersebut masih digabungkan ke dalam akun Beban Pemeliharaan Sarana dan Prasarana secara keseluruhan." (Wawancara, 22 Juni 2026).

Tabel 3. Ilustrasi Jurnal Pengakuan Biaya Pemeliharaan IPAL.

Beban Pemeliharaan Sarana dan Prasarana	Rp. 3.000.000
Kas	Rp. 3.000.000

Sumber: Data Diolah Peneliti, 2026.

Kedua ilustrasi jurnal tersebut menunjukkan bahwa dari sisi waktu pengakuan, praktik akuntansi RS Unpad telah sesuai dengan basis akrual sebagaimana dipersyaratkan Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan paragraf 5.1, yakni suatu pos diakui apabila nilainya dapat diukur secara andal dan manfaat ekonominya telah diperoleh entitas. Namun, dari sisi klasifikasi akun, biaya pemeliharaan IPAL yang masih tergabung dalam akun Beban

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana menunjukkan bahwa RS Unpad belum memisahkan secara eksplisit biaya lingkungan dari biaya operasional umum. Akibatnya, meskipun peristiwa ekonomi telah dicatat dengan tepat, besaran biaya lingkungan secara agregat sulit ditelusuri dari laporan keuangan tanpa penelusuran manual ke dokumen sumber.

Pengukuran Biaya Lingkungan

Pengukuran biaya lingkungan di RS Unpad masih bersifat sederhana, yaitu hanya berupa pencatatan nominal berdasarkan *invoice* vendor, tanpa disertai analisis rasio terhadap beban operasional maupun pendapatan rumah sakit. Hal ini disebabkan oleh persepsi manajemen bahwa proporsi biaya lingkungan masih relatif kecil sehingga dianggap belum signifikan untuk dianalisis lebih lanjut, serta adanya ketergantungan pada tarif yang ditetapkan sepihak oleh vendor. Kondisi ini menunjukkan bahwa praktik pengukuran biaya lingkungan di RS Unpad belum sepenuhnya sejalan dengan prinsip estimasi yang andal sebagaimana diamanatkan dalam paragraf 6.1 Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan.

Penyajian Biaya Lingkungan

Penyajian biaya lingkungan dalam laporan keuangan RS Unpad masih terbatas dan belum disajikan sebagai pos atau akun tersendiri. Biaya pengangkutan limbah medis saat ini disajikan sebagai bagian dari akun 'Beban Lainnya', sedangkan biaya pemeliharaan IPAL disajikan sebagai bagian dari akun 'Beban Pemeliharaan Sarana dan Prasarana yang bersifat umum'. Kondisi ini ditegaskan oleh pernyataan Manajer Unit Akuntansi dan Keuangan RS Unpad berikut. "Biaya lingkungan belum disajikan sebagai pos tersendiri dalam laporan keuangan. Sebagai contoh, biaya pengangkutan limbah medis saat ini digabungkan ke dalam akun beban lainnya dan belum dipisahkan menjadi pos khusus." (Wawancara, 7 Juli 2026). Penggabungan biaya lingkungan ke dalam akun beban operasional umum di Rumah Sakit Universitas Padjadjaran menyebabkan tidak tersedianya informasi agregat mengenai total biaya lingkungan secara transparan. Kondisi ini bertentangan dengan teori Hansen et al. (2026) yang menekankan pentingnya penyajian biaya lingkungan secara terpisah dan terklasifikasi guna mendukung pengendalian, serta evaluasi kinerja lingkungan. Sehingga, manajemen rumah sakit mengalami kesulitan dalam mengevaluasi efektivitas pengelolaan lingkungan berbasis aspek keuangan secara komprehensif.

Pengungkapan Biaya Lingkungan

Dari sisi pengungkapan, informasi terkait biaya lingkungan hingga saat ini masih disajikan secara agregat dalam akun Beban Lainnya, tanpa disertai penjabaran yang memadai pada Catatan atas Laporan Keuangan (CALK). Temuan observasi terhadap media informasi publik maupun lingkungan sekitar rumah sakit turut memperkuat indikasi tersebut, di mana

tidak ditemukan adanya laporan keberlanjutan (*sustainability report*) maupun papan informasi yang secara khusus memuat data biaya lingkungan bagi publik dan pemangku kepentingan eksternal. Minimnya pengungkapan ini tidak terlepas dari status RS Unpad yang belum tergolong sebagai entitas terbuka (*go public*), sehingga kewajiban regulasi untuk mengungkapkan biaya lingkungan secara formal belum berlaku bagi institusi tersebut. Namun, PSAK 201 pada prinsipnya telah memberikan ruang bagi entitas untuk menyusun laporan tambahan mengenai aspek lingkungan hidup secara sukarela. Peluang tersebut tampaknya belum dimanfaatkan secara maksimal oleh RS Unpad, sehingga pengungkapan sukarela atas biaya lingkungan dapat dipandang sebagai salah satu ranah perbaikan yang bersifat strategis, terutama mengingat akan diberlakukannya kewajiban penyusunan *Sustainability Report* secara efektif pada tahun 2027.

Kendala dan Tantangan Implementasi *Green Accounting* pada Rumah Sakit Universitas Padjadjaran

Dalam penelitian ini, analisis SWOT digunakan untuk mengidentifikasi kendala dan tantangan yang dihadapi RS Unpad dalam mengimplementasikan *green accounting*, sehingga dapat diperoleh gambaran mengenai faktor internal yaitu kekuatan dan kelemahan serta faktor eksternal yaitu peluang dan ancaman, sebagai berikut:

Tabel 4. Analisis SWOT pada Implementasi *Green Accounting* RS Unpad.

Kekuatan (<i>Strengths</i>)	Kelemahan (<i>Weakness</i>)
SDM khusus yang bertanggung jawab menangani pengelolaan limbah.	Keterbatasan anggaran untuk peningkatan infrastruktur IPAL dan TPS yang membutuhkan investasi di atas Rp1 miliar.
SPO yang mengatur setiap tahapan pengelolaan limbah.	RKAT unit HSSE yang telah disusun tidak berjalan sebagaimana mestinya.
Komitmen manajemen <i>top-down</i> dari jajaran direksi.	Kurangnya peralatan operasional pendukung.
Kode akun khusus (Beban Pengangkutan Limbah Medis) untuk pencatatan biaya.	Sistem pencatatan biaya lingkungan manual melalui <i>spreadsheets</i> , belum terintegrasi dengan sistem akuntansi.
Dokumentasi administratif transaksi yang tertata rapi.	Beban kerja staf keuangan yang tinggi.
	Ancaman (<i>Threats</i>)
Peluang (<i>Opportunities</i>)	Belum ada regulasi spesifik yang mewajibkan pelaporan biaya lingkungan bagi sektor rumah sakit.
Kolaborasi akademis lintas fakultas untuk pengujian kualitas lingkungan.	Status RS Unpad belum entitas terbuka, sehingga <i>sustainability report</i> belum wajib (sebelum efektif berlaku tahun 2027).
Integrasi aspek lingkungan sejak tahap pengadaan barang modal.	Ketergantungan pada vendor pihak ketiga.
Pengembangan sistem akuntansi melalui integrasi data unit HSSE.	Risiko investasi peralatan yang belum tentu efisien.
Dorongan regulasi, seperti program PROPER.	Potensi gangguan layanan akibat keterlambatan pembayaran vendor.
Potensi <i>environmental revenue</i> dari daur ulang limbah anorganik.	Risiko sanksi hukum dari pengawasan Dinas Kesehatan dan Dinas Lingkungan Hidup.
Peluang penguatan transparansi kepada masyarakat sekitar.	Risiko reputasi akibat potensi tindakan oknum internal maupun eksternal.

Sumber: Data Diolah Peneliti, 2026.

Selain memetakan melalui analisis SWOT, penelitian ini juga mengidentifikasi bahwa implementasi *Green Accounting* yang efektif seharusnya tidak hanya mencatat biaya lingkungan yang telah terjadi, tetapi juga mempertimbangkan potensi dampak finansial dari keputusan pengelolaan lingkungan di masa mendatang. Pertumbuhan RS Unpad yang berlangsung relatif cepat, baik dari sisi jumlah pasien, kapasitas layanan, maupun pendapatan operasional turut berimplikasi pada peningkatan volume limbah yang dihasilkan dari aktivitas pelayanan kesehatan. Kondisi ini memerlukan pertimbangan manajemen dari sisi keberlanjutan antara aspek lingkungan dan dampak finansialnya yang menunjukkan bahwa setiap kendala menuntut adanya alokasi investasi pada tahap awal, baik dalam bentuk pembangunan infrastruktur, penyelenggaraan pelatihan, penguatan sistem akuntansi, maupun pengawasan. Investasi tersebut dapat dimaknai sebagai bentuk upaya penghindaran biaya yang lebih besar di masa mendatang (*cost avoidance*) yang berorientasi jangka panjang. Keterbatasan anggaran infrastruktur merupakan tantangan paling material, dengan estimasi biaya yang dapat melampaui Rp1 Miliar akibat kapasitas TPS dan IPAL yang telah terlampaui.

Tak hanya itu, RKAT yang sudah disusun tidak berjalan sebagaimana mestinya, yang disebabkan oleh proses pengajuan anggaran yang sulit dan cenderung mengalami pemotongan, serta belum adanya akun biaya lingkungan tersendiri, sehingga sebagian besar RKAT masih menyatu ke dalam akun umum dan sulit dipantau realisasinya. Hal tersebut telah menjadi kendala lainnya, seperti belum tersedianya standar akuntansi, ketiadaan kewajiban regulasi, dan rendahnya pemahaman staf. Namun, kondisi ini menimbulkan beban biaya yang relatif lebih ringan karena dapat diselesaikan secara bertahap tanpa pengeluaran besar sekaligus. Pola tersebut memperkuat argumentasi bahwa implementasi *Green Accounting* pada RS Unpad, meskipun meningkatkan biaya dalam jangka pendek yang dikategorikan sebagai biaya pencegahan, yang berpotensi untuk menekan biaya kegagalan internal maupun eksternal yang jauh lebih besar dalam jangka panjang, sejalan dengan kerangka konseptual biaya lingkungan. Selain itu, potensi nilai jual limbah anorganik menunjukkan peluang transformasi limbah dari pengeluaran menjadi pendapatan, meskipun peluang ini masih dibatasi oleh keterbatasan SDM yang kompeten dalam pengelolaan dan komersialisasi limbah.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi *Green Accounting* belum dilakukan secara formal, biaya lingkungan baru teridentifikasi terbatas, diakui berbasis akrual namun belum terklasifikasi khusus, diukur berdasarkan *invoice* vendor tanpa analisis rasio, serta belum disajikan dan diungkapkan sebagai pos tersendiri. Keterbatasan penelitian ini mengindikasikan

bahwa temuan penelitian ini bersifat spesifik dan kontekstual, mengingat cakupannya yang terbatas pada satu dimensi biaya lingkungan, yakni biaya pengelolaan limbah, serta hanya dilaksanakan pada satu objek penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Kondisi tersebut menyebabkan hasil penelitian belum dapat digeneralisasikan secara luas terhadap konteks rumah sakit pendidikan lainnya di Indonesia. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan aspek lingkungan yang dikaji, melibatkan objek penelitian yang lebih beragam, serta mengintegrasikan pendekatan kuantitatif atau *mixed method* guna memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai implementasi *Green Accounting* pada entitas rumah sakit.

DAFTAR REFERENSI

- Ainiyah, I. N. (2025, March 6). *Kebijakan dividen: Antara keuntungan jangka pendek dan pertumbuhan jangka panjang*. Umsida. <https://manajemens2.umsida.ac.id/kebijakan-dividen-keuntungan-jangka-pendek/>
- Astuti, N. D., Malau, E. I., & Bahantwelu, M. I. (2025). Model konseptual integrasi akuntansi lingkungan ke dalam pelaporan keuangan: Implikasi bagi akuntabilitas dan praktik akuntansi modern. *Jurnal Akuntansi: Transparansi dan Akuntabilitas*, 13(2), 77–85. <https://doi.org/10.35508/jak.v13i2.25476>
- Batara, I. W., Permata, M. B., Putri, S. Y., Wilasittha, A. A., & Widajantie, T. D. (2024). Green healthcare accountability: A comprehensive review of environmental accounting in hospitals. *8th International Seminar of Research Month 2023*, 329–335. <https://doi.org/10.11594/nstp.2024.4153>
- Carroll, A. B., Brown, J., & Buchholtz, A. K. (2018). *Business & society: Ethics, sustainability & stakeholder management*. Cengage Learning.
- Dachi, C. S., & Djakman, C. D. (2020). Penerapan stakeholder engagement dalam corporate social responsibility: Studi kasus pada Rumah Sakit Mata X. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 8(2), 291–306. <https://doi.org/10.17509/jrak.v8i2.21535>
- Deegan, C. (2023). *Financial accounting theory* (5th ed.). McGraw Hill.
- Fadilah, D. R., Safriliana, R., & Sumtaky, M. (2025). Tinjauan fenomenologi: Akuntansi lingkungan dalam pengelolaan limbah Rumah Sakit X. *Jurnal Ar Ro'is Mandalika (ARMADA)*, 5(1), 77–100. <https://doi.org/10.59613/armada.v5i1.5226>
- Febriyanti, R., Astriani, D., & Trisyanto, A. (2024). Analisis penerapan akuntansi lingkungan terhadap pengendalian biaya operasional pengelolaan limbah pada Rumah Sakit Karya Husada. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 6(10), 6719–6735. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v6i10.3072>
- Flora, M., Rafidah, & Tanjung, F. S. (2025). Analisis penerapan akuntansi lingkungan (green accounting) pada pengelolaan limbah di RSUD Raden Mattaher. *Jurnal Makesya*, 5(1), 143–158. <https://doi.org/10.30631/makesya.v5i1.3356>
- Freeman, R. E., Phillips, R., & Sisodia, R. (2020). Tensions in stakeholder theory. *Business & Society*, 59(2), 213–231. <https://doi.org/10.1177/0007650318773750>